



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN NGAMPILAN
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya Kecamatan Ngampilan telah dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2018 dengan baik. Dukungan sumber daya manusia yang memiliki semangat dan kinerja yang tinggi mempengaruhi kinerja organisasi Kecamatan Ngampilan sehingga dari tahun ke tahun kinerja organisasi semakin baik.

Saat ini tuntutan terhadap kinerja yang baik tidak hanya tertuju pada sektor privat saja, sektor publik pun dituntut hal yang sama, yaitu mencapai tingkat kinerja organisasi yang tinggi yang ditunjukkan antara lain dengan kejelasan visi dan misi, pencapaian tujuan, kepuasan masyarakat/pihak yang dilayani, pembinaan pegawai dan pengembangan prosedur yang baik. Untuk memenuhi tuntutan ini, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mewujudkannya karena kinerja birokrasi pemerintah saat ini terus ditingkatkan untuk lebih professional dalam melakukan pelayanan terhadap kepentingan publik.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi dibutuhkan upaya pengukuran/evaluasi kinerja organisasi untuk mengetahui tingkat kinerja dan berbagai upaya yang bisa ditempuh untuk meningkatkan kinerja. Dalam rangka hal tersebut dilakukan evaluasi dan pengukuran kinerja pada Kecamatan Ngampilan, dari hasil evaluasi/ pengukuran kinerja tersebut dapat menjadi bahan perbaikan dan peningkatan kinerja kearah yang lebih optimal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban organisasi dalam melaksanakan visi, misi dan program/kegiatan. Laporan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kinerja Kecamatan Ngampilan dengan mempertimbangkan potensi maupun hambatan dalam pelaksanaan program/ kegiatan selama tahun 2018.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018, sehingga seluruh kegiatan ini dapat terlaksana. Kami berharap laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran tentang upaya Kecamatan Ngampilan dalam mendukung terwujudnya tujuan RPJMD dan mendukung target nasional.

Yogyakarta, 28 Januari 2019

Camat

Drs. ANANTO WIBOWO
NIP. 197305241992031003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kondisi Kecamatan Ngampilan	3
D. Gambaran Organisasi	4
E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	5
F. Potensi Kecamatan Ngampilan.....	7
G. Aspek Strategi Organisasi dan Permasalahan Organisasi.....	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja.....	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. Capaian Kinerja Tahun 2018	24
1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2018	24
2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.....	30
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah sesuai dengan Renstra Kecamatan Ngampilan tahun 2017-2022	31
4. Analisis Penyebab Keberhasilan /kegagalan Kinerja	32
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
6. Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja.....	37
B. Realisasi Anggaran.....	39
BAB IV. PENUTUP.....	41
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah menjadi tolok ukur penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menyajikan hasil dan analisa penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngampilan dengan menyajikan data-data kinerja selama tahun 2018. Upaya ini selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum dalam Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 58 bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Peraturan Kinerja, Tata Cara, Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bertanggung jawab, akuntable dan transparan. Berkaitan dengan hal tersebut Kecamatan Ngampilan juga telah mempergunakan aplikasi pelaporan LKIP yang berbasis teknologi yaitu dengan Sistem E-LKIP yang merupakan satu kesatuan dalam sistem pengendalian pembangunan.

Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Daerah selama kurun waktu satu tahun anggaran dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Penyusunan Laporan Kinerja ini menjadi alat untuk evaluasi dalam pencapaian sasaran program dan output kegiatan. Laporan Kinerja digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang selanjutnya untuk acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan pendekatan ini Laporan Kinerja merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan untuk perbaikan selanjutnya.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis. LKIP merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan suatu sistem akuntabilitas kinerja yang transparan dan kredibel. Dalam perspektif yang lebih luas, LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Ngampilan.

Sedangkan tujuan pembuatan LKIP Kecamatan Ngampilan adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Kecamatan Ngampilan dalam rangka mendukung Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam jangka menengah dan jangka panjang sesuai dalam rencana pembangunan daerah baik RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

C. Kondisi Kecamatan Ngampilan

Kecamatan Ngampilan merupakan salah satu kecamatan di Kota Yogyakarta yang terletak di sisi barat Kota Yogyakarta dengan ketinggian dari permukaan laut 114 m dengan Luas Wilayah 0,82 Km dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Gedong Tengen
- Sebelah Selatan : Kecamatan Mantriweron
- Sebelah Timur : Kecamatan Kraton & Kecamatan Gondomanan
- Sebelah barat : Kecamatan Wirobrajan

Luas wilayah Kecamatan Ngampilan relatif kecil dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain namun karena letaknya di pusat Kota Yogyakarta dan merupakan bagian dari kawasan penyangga wisata Malioboro dan Keraton sehingga memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pariwisata Kota Yogyakarta.

Peta Kecamatan Ngampilan



Kecamatan Ngampilan terdiri dari 2 Kelurahan, dan Jumlah penduduk Kecamatan Ngampilan pada tahun 2018 sebanyak 18.529 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk sebagai berikut :

Tabel I.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Ngampilan Tahun 2018

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Ngampilan	5.010	5.340	10.350
2	Notoprajan	4.058	4.121	8.179
	TOTAL	9.068	9.461	18.529

Sumber data: Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Des 2018

Kelembagaan masyarakat dan sosial yang ada di Kecamatan Ngampilan adalah sebagaimana dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel I.2
Jumlah RW dan RT Kecamatan Ngampilan

NO	WILAYAH	RW	RT	JUMLAH
1	Kelurahan Ngampilan	13	70	83
2	Kelurahan Notoprajan	8	50	58
	TOTAL	21	120	141

Sumber data: Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Des 2018

Data kelembagaan lainnya dalam masing-masing kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. LPMK : 2 (LPMK Notoprajan dan LPMK Ngampilan)
- b. BKM : 2 (BKM Kelurahan Notoprajan dan BKM Kelurahan Ngampilan)
- c. PKK :
 - 3 TP PKK
 - 21 PKK RW
 - 120 PKK RT

Disamping itu masih terdapat Karang Taruna, Rumangsa, KTB, BKB, PKBM, Komisi Lansia dll.

D. Gambaran Organisasi

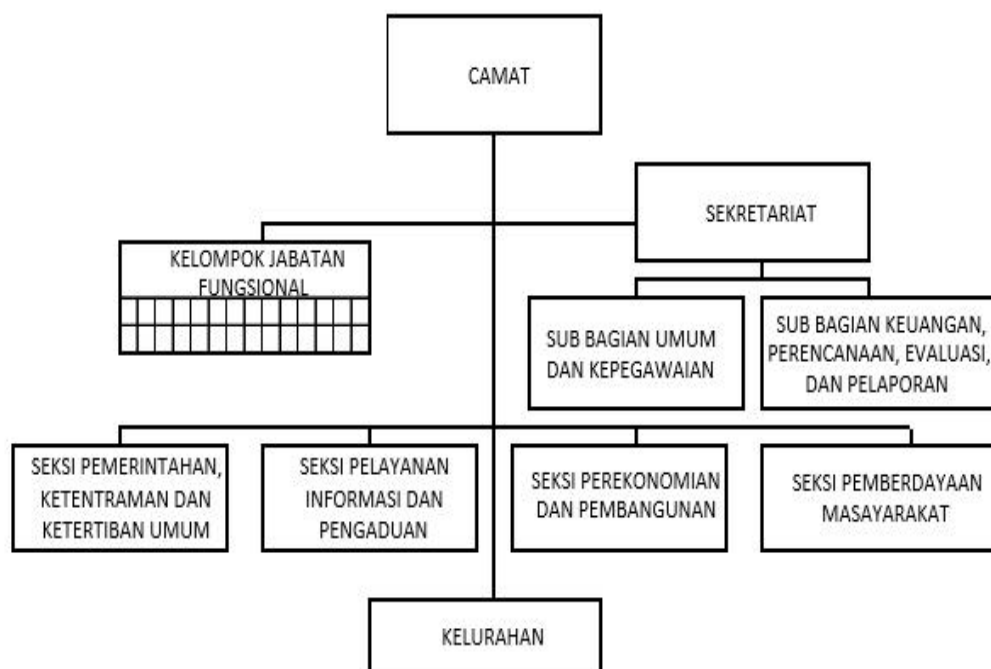
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Susunan Organisasi Kecamatan Ngampilan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan;
 - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Ngampilan sebagai Kecamatan Tipe B mempunyai Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kecamatan Ngampilan



E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Kecamatan dalam Struktur Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta merupakan salah satu Satuan Unit Kerja yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan. Dalam Peraturan Daerah tersebut ditegaskan bahwa :

“ Kecamatan merupakan Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.”

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomer 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta tersebut telah didahului dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan pada kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 3 peraturan tersebut, Kedudukan Kecamatan Ngampilan tersurat sebagai berikut:

- (1) Kecamatan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Pasal 4 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan di wilayah masing-masing.

2. Tugas Pokok

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota kepada Camat untuk menangani beberapa urusan otonomi daerah berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Kecamatan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi tugasnya dan yang belum dilaksanakan pemerintahan Kelurahan.

3. Fungsi

Kecamatan mempunyai fungsi yaitu : menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan pelimpahan dari Walikota, pelimpahan kewenangan kepada kecamatan disesuaikan dengan potensi masing-masing sehingga jumlah pelimpahan kewenangan ke kecamatan tidak sama terutama untuk penanganan perizinan. Kecamatan memiliki fungsi melakukan beberapa hal yang meliputi aspek :

- a. Perijinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitasi
- g. Penetapan
- h. Mediasi
- i. Penyelenggaraan dan
- j. Kewenangan lain.

F. Potensi Kecamatan Ngampilan

1. Kondisi Sumber Daya Manusia

Kebijakan moratorium terkait penambahan jumlah pegawai negeri yang diterapkan oleh Kementerian Dalam Negeri berpengaruh terhadap jumlah aparatur sipil negara yang semakin berkurang. Keterbatasan personil menyebabkan jumlah pegawai di masing-masing perangkat daerah kurang sesuai dengan Analisis Jabatan (anjab) yang seharusnya. Demikian halnya di Kecamatan Ngampilan jumlah aparatur sipil negara di Kecamatan dan kelurahan sangat minim sehingga jumlah yang ada harus dioptimalkan agar pelaksanaan tugas tetap dapat berjalan dengan baik. Keadaan ini memerlukan strategi untuk mengoptimalkan potensi masing-masing pegawai dengan memberikan motivasi kerja dan menerapkan ketugasan rangkap bagi pegawai. Hal ini penting untuk dilakukan karena SDM sangat berpengaruh langsung terhadap pencapaian arah, tujuan dan sasaran instansi.

Jumlah aparatur sipil negara yang ada di Kecamatan Ngampilan sebanyak 24 orang, terdiri dari 21 orang pegawai tetap (PNS) dan 3 orang pegawai tidak tetap (tenaga bantuan), Apabila dibandingkan dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi yang ada, masih membutuhkan adanya penambahan

personil, terutama unsur staf pembantu dari masing-masing seksi maupun sekretariat. Keadaan personil Kecamatan Ngampilan per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

Tabel I.3
Data Pegawai Kecamatan Ngampilan

	Uraian Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
1.	Camat	1	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris kecamatan	1	-	-	-	1	1
3.	Kasi kecamatan	2	2	-	4	-	4
4.	Kasubag	-	2	-	2	-	2
5.	JFU kecamatan	2	1	1	2	-	3
6.	JFT kecamatan	1	-	-	1	-	1
7.	Naban kecamatan	2	1	-	-	-	3
8.	Lurah	2	-	-	2	-	2
9.	Sekretaris kelurahan	-	2	-	2	-	2
10.	Kasi Kelurahan	3	3	-	6	-	6
11.	JFU kelurahan	1	-	1	-	-	1
12.	Naban kelurahan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	15	11	2	19	2	26

Sumber data : Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian , Des 2018

Tabel I.4
Data Pegawai Yang Sudah Mengikuti Diklat Penjurangan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	Diklatpim III	2	2	0
2	Diklatpim IV	5	1	4
3	ADUM	7	4	3
4	SEPADA	-	-	-
5	Struktural yang belum diklat	4	2	2
	Jumlah Total	18	9	9

Sumber data : Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian, Des 2018

Tabel I.5
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – laki	Perempuan
1	S2	3	1	2
2	S1	14	5	9
3	D III	2	2	-
4	SLTA	6	5	1
5	SLTP	-	-	-
6.	SD	1	1	-

	Jumlah Total	26	14	12
--	--------------	----	----	----

Sumber data : Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian, Des 2018

2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung kantor dan sarana pendukung kelancaran pelayanan dan penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor kelurahan dan kebutuhan pendukung gedung kantor seperti tempat parkir kendaraan.

Jumlah sarana dan prasarana kerja yang terinventarisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas di Kecamatan Ngampilan sebagai berikut :

Tabel I.6
Sarana Prasarana Kecamatan Ngampilan Tahun 2018

NO.	JENIS/NAMA BARANG	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH	KONDISI
1.	Tanah & gedung Kantor	1	2	3	Baik
2.	Rumah Dinas	1	0	1	Baik
3.	Kendaraan Roda 4	1	0	1	Baik
4.	Kendaraan Roda 2	9	3	12	Baik
5.	Kendaraan Roda 3	1	-	1	Baik
6.	Sepeda Ontel	2	4	6	Baik
7.	Komputer Administrasi	9	6	15	Baik
8.	Komputer SIAK	3	0	3	Baik
9.	Printer	13	7	20	Baik
9.	Mesin Ketik	2	4	6	Baik
10.	Televisi	4	2	6	Baik
11.	Wireless	2	2	4	Baik
12.	Air Conditioner	7	3	10	Baik
13.	Amplifier	1	2	3	Baik
14.	Horn TOA	1	2	3	Baik
15.	Pesawat Telepon	2	2	4	Baik
16.	Faximile	1	2	3	Baik
17.	Brankas	1	2	3	Baik
18.	Filling Kabinet	10	6	16	Baik
19.	Almari	10	6	16	Baik
20.	Almari Kaca	4	2	6	Baik
21.	Almari Arsip	1	2	3	Baik
22.	Meja Kerja	20	12	32	Baik
23.	Meja Rapat	10	6	16	Baik
24.	Meja Komputer	9	6	15	Baik
24.	Kursi Kerja	47	40	87	Baik
25.	Kursi Lipat	120	160	280	Baik
26.	Kursi Rapat	29	18	47	Baik

NO.	JENIS/NAMA BARANG	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH	KONDISI
27.	Gamelan	1 set	1set	2	Baik
28.	Kamera Digital	1	2	3	Baik
29.	LCD (Proyektor)	1	0	1	Baik
30.	Laptop	3	2	5	Baik
31.	Kipas Angin	9	6	15	Baik
32.	Sice	3 set	4 set	7 set	Baik
33.	Sepeda Listrik	1	0	1	Baik
34.	Genset	1	0	1	Baik
35.	Mesin Presensi	1	0	1	Baik
36.	HT	2	2	4	Baik
37.	White Board	6	4	10	Baik

Sumber data : Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian, Des 2018

3. Instansi Vertikal dan Otonom

Adapun Jumlah Instansi Vertikal dan Otonom yang berada di Kecamatan Ngampilan terdiri dari :

1) Instansi Vertikal :

- a). Statistik
- b). K U A
- c). Koramil
- d). Polsekta

2) Instansi Otonom :

- a). Puskesmas
- b). Pertanian
- c). Pengawas TK/SD
- d). PKB
- e). Pekerja Sosial

Keberadaan instansi vertikal maupun otonom akan sangat berpengaruh terhadap terwujudnya penyelenggaraan, pembangunan dan kemasyarakatan, terutama yang terkait dengan tugas-tugas pembantuan/pelimpahan kewenangan yang diberikan.

G. Aspek Strategi Organisasi dan Permasalahan Organisasi

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan.

Pelaksanaan kinerja Pemerintah selalu mengalami perubahan untuk mewujudkan tuntutan masyarakat yang selalu mencermati dan memperhatikan kinerja Pemerintah dalam pelayanan.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimulai dari strukturalisasi kelembagaan, budaya birokrat untuk perbaikan yang lebih baik, maka perubahan tersebut dibuat dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi, sehingga terwujud tujuan Pemerintah daerah dalam mencapai *Good dan Clean Governance*.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan ketugasan adalah :

1. Terbatasnya SDM yang ada di organisasi.
2. Beban pekerjaan yang banyak, mengingat organisasi kecamatan selaku OPD mandiri yang punya kegiatan dan anggaran sendiri, namun harus membantu pelaksanaan kegiatan OPD lain yang terkadang menyita waktu, tenaga, biaya dan pikiran.
3. Pelimpahan kewenangan yang perlu ketegasan lebih lanjut, sehingga tidak ada kegiatan yang harus dilaksanakan namun tidak jelas pengampunya atau bahkan dikerjakan oleh beberapa OPD karena masing-masing merasa itu kewenangannya.
4. Adanya grading OPD yang membuat ketidaknyamanan dalam bekerja, karena mengingat OPD dengan grading C beda jauh TPPnya dengan OPD grading B terlebih dengan OPD grading A.
5. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi sebagai sarana penyebarluasan informasi.
6. Kebijakan atau peraturan dari atas yang terlalu kaku/terlalu detail atau sering berubah ubah sehingga membuat kesulitan untuk dilaksanakan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Peningkatan kapabilitas aparatur sipil negara melalui kegiatan pembinaan pegawai yang dilaksanakan secara rutin untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja, baik dalam forum formal maupun non formal. Kesetaraan peran menjadi kunci bahwa masing-masing ASN memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung kinerja perangkat daerah
2. Mengoptimalkan Dukungan Sumber daya pegawai yang ada dan memberikan kesempatan kepada pegawai yang masih potensial untuk dikembangkan dengan metode rangkap ketugasan.
3. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan BPKAD, Bappeda, Bagian Tata Pemerintahan dan perangkat daerah lintas sektor lainnya.

4. Mengusulkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membuat aturan-aturan yang implementatif dan tidak diskriminatif yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.
5. Terus mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan teknologi informasi.
6. Berupaya untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam mendukung ketugasan dan bekerjasama dan bermitra dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada, seperti forum BKM, Forum LPMK, Forum FKPSM, PKK dan lain-lain.

Dengan kerja sama, koordinasi dan sinergitas antar perangkat daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan maka beberapa hambatan yang muncul dapat teratasi sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target kinerja. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Kecamatan Ngampilan untuk melaksanakan seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kepentingan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Telaah Rencana Strategis Kecamatan Ngampilan

Rencana Strategis Kecamatan Ngampilan juga mengacu pada renstra Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya mewujudkan target nasional. Kementerian Dalam Negeri memiliki 12 sasaran strategis dan Kecamatan Ngampilan memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran Kementerian Dalam Negeri tersebut yaitu :

- **Sasaran 1: Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa**
Kecamatan Ngampilan memiliki fungsi untuk pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kecamatan Ngampilan. Hal ini sangat berkaitan dengan upaya menjamin stabilitas keamanan dan penciptaan suasana kondusif dalam rangka mengantisipasi timbulnya gejolak berkaitan dengan isu SARA (Suku, Agama dan Ras) yang rawan terjadi. Beberapa hal yang dilakukan Kecamatan Ngampilan untuk mendukung sasaran ini :
 - a. Menumbuhkan kesadaran bela negara dikalangan generasi muda dengan pembinaan generasi muda dan karang taruna.
 - b. Memanfaatkan potensi masyarakat untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban wilayah agar tidak timbul upaya disintegrasi bangsa.
 - c. Melakukan mediasi warga untuk meminimalisir dan menangani konflik yang terjadi di wilayah yang berkaitan dengan politik dan sosial budaya/kultur.
 - d. Melakukan monitoring dan pengamanan wilayah secara berkala untuk mengidentifikasi potensi kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban.
- **Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.**

Salah satu indikator sasaran ini adalah tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kecamatan Ngampilan memiliki fungsi sebagai

penyelenggara pemerintahan umum kepada masyarakat, berkewajiban menyelenggarakan tata kelola pemerintahan sesuai perundang-undangan. Dalam rangka mendukung sasaran ini Kecamatan Ngampilan melakukan upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang berpedoman pada penciptaan *Good goverment* dan *Good Governance* yang mengedepankan kepastian prosedur, layanan, pembiayaan dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

- Sasaran 4: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Beberapa indikator dari sasaran ini adalah penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai Standar Peningkatan Mutu (SPM), penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM dan persentase penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Kecamatan Ngampilan sebagai penyelenggara layanan masyarakat sangat berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan publik dan sasaran ini selaras dengan misi 1 Walikota Yogyakarta yang berupaya menumbuhkan keberdayaan warga masyarakat. Kecamatan Ngampilan merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung misi ini sehingga upaya yang dilakukan juga selaras dengan sasaran 4 Kemendagri. Meskipun demikian untuk bidang ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran hanya sebagai *supproting unit* dari Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD Kota Yogyakarta.

- Sasaran 7: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat

Kecamatan Ngampilan memiliki kewenangan dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat karena kelurahan merupakan bagian dari kecamatan. Dalam mendukung sasaran ini Kecamatan Ngampilan melakukan beberapa langkah :

1. Melakukan pembinaan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.
2. Melakukan monev pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP)
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang SPP
4. Melakukan penilaian atau evaluasi terhadap perkembangan pembangunan kelurahan.

- Sasaran 8: Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.

Kecamatan sebagai garda depan pelayanan administrasi kependudukan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan sasaran ini karena kecamatan menjadi penggerak bagi warga masyarakat untuk melakukan tertib administrasi kependudukan melalui perekaman KTP Elektronik. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan database kependudukan yang akurat. Kegiatan yang dilakukan Kecamatan Ngampilan untuk mendukung sasaran ini adalah dengan memberikan himbauan kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat dan memanfaatkan forum –forum pertemuan warga untuk memberikan informasi pentingnya dokumen kependudukan bagi masyarakat dan pentingnya perekaman E-KTP sebagai *single identity* untuk pengurusan semua dokumen. Kecamatan Ngampilan melakukan pelayanan perekaman E-KTP dan melakukan distribusi serta verifikasi data kependudukan, hal ini merupakan bagian dari fungsi Kecamatan Ngampilan sebagai penyelenggara layanan umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Ngampilan memiliki keterkaitan langsung terhadap pencapaian target nasional khususnya sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri terutama untuk sasaran 7 dan 8 karena Kecamatan memiliki kewenangan terhadap peningkatan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan dan memiliki keterkaitan langsung terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan menjadi garda depan validasi dan akurasi data kependudukan. Kecamatan Ngampilan juga menjadi pendukung untuk pencapaian sasaran 1, 3 dan 4 Kemendagri meskipun tidak secara langsung karena kewenangan yang ada di kecamatan bersifat parsial dan hanya mendukung output dari instansi teknis.

Referensi renstra lembaga lain pada Tingkat DIY adalah Biro Tata Pemerintahan, Visi Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah "*Terwujudnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Bahan Perumusan Kebijakan yang Responsif dan Berkualitas*". Salah satu misinya adalah meningkatkan manajemen pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel yang mencakup aspek tata kelola pemerintahan. Sasaran Biro Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil
2. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah

3. Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran Perangkat Daerah

Berkaitan dengan sasaran tersebut maka Kecamatan Ngampilan memiliki keterkaitan untuk turut mewujudkan sasaran tersebut karena kewenangan dan fungsi untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan melakukan pelayanan berkaitan dengan administrasi kependudukan sebagai *supporting unit* dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih maka Kecamatan Ngampilan melakukan upaya untuk mendukung sasaran tersebut dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara akuntabel dan transparan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kecamatan Ngampilan juga berupaya meningkatkan capaian kinerja program dan kinerja kegiatan dengan melakukan perbaikan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat dan berorientasi pada *output* dan *outcome*, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan secara berkala agar capaian target sesuai yang direncanakan. Dengan demikian Kecamatan Ngampilan memiliki keterkaitan secara langsung untuk mendukung terwujudnya sasaran dari Biro Tata Pemerintahan DIY dalam hal peningkatan kualitas data kependudukan yang akurat, meningkatkan tertib administrasi pemerintahan dan dalam meningkatkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), perencanaan strategis merupakan dasar bagi Kecamatan Ngampilan dalam menyusun program dan kegiatan dengan mengacu pada kebijakan Camat Ngampilan dan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta. Perencanaan strategis yang jelas dan sinergis sangat bermanfaat dalam menyelaraskan kebijakan Kecamatan Ngampilan dalam mengoptimalkan potensi dan peluang untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja. Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di Kecamatan Ngampilan adalah untuk :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kecamatan Ngampilan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta.

2. Sebagai pedoman bagi seluruh seksi di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngampilan yang memuat program dan kegiatan.

Dalam perencanaan program dan kegiatan Kecamatan mengacu pada dokumen RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 agar perencanaan Kecamatan Ngampilan sinergi dengan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam Dokumen RPJMD memuat visi Pembangunan Kota Yogyakarta masa 2017-2022 dari yaitu “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Kecamatan Ngampilan menjadi salah satu perangkat daerah yang mendukung terwujudnya misi 1 yaitu : **“Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat”** melalui program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan. Upaya meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat memiliki implikasi yang sangat kompleks sehingga melibatkan peran perangkat daerah lintas sektor.

Rencana Kerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sebagai bentuk penjabaran terhadap perencanaan anggaran dan sebagai upaya mewujudkan tertib pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2018 menampung 4 (empat) program dan 12 (dua belas kegiatan), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel II.1
Program dan Kegiatan Tahun 2018

No.	Nama Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	56.060.000,00
		2. Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	473.661.795,00
		3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	73.962.444,00
II	Peningkatan sarana dan Aparatur	1. Peliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	199.774.224,00
		2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	51.998.000,00
III	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	11.180.000,00
IV	Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ngampilan	166.763.640,00
		2. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan Ngampilan	42.762.395,00
		3. Pembinaan Sosial dan Budaya Kecamatan Ngampilan	194.005.400,00
		4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Ngampilan	288.024.380,00
		5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Notoprajan	187.184.000,00
		6. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Pembinaan Perekonomian	388.278.950,00

		masyarakat Kecamatan Ngampilan	
--	--	-----------------------------------	--

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kecamatan Ngampilan untuk mendukung capaian target nasional dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, target Provinsi DIY dan target RPJMD Kota Yogyakarta secara riil adalah dengan melakukan penajaman terhadap sub kegiatan yang ada dalam Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan. Berkaitan dengan hal tersebut maka program eksternal yang dilakukan harus sinergis dengan renstra Kecamatan Ngampilan yang mengacu pada dokumen perencanaan instansi di atasnya. Proses perencanaan melibatkan masyarakat di tingkat RW melalui penjaringan aspirasi (musrenbang) dan sinkronisasi program dengan perangkat daerah lintas sektor adalah proses perencanaan yang menggabungkan antara sistem *Bottom up* dan *Top Down* dan hasil perencanaan tersebut tertuang dalam program /kegiatan eksternal dalam Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan.

2. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu dan untuk tujuan dalam Renstra Kecamatan Ngampilan jangka waktu pencapaian tujuan adalah lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Ngampilan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yaitu : **“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Ngampilan”**

Tujuan tersebut diukur melalui indikator tujuan, yaitu **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan** dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 350, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 389

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ngampilan menetapkan sasaran sebagai berikut: **“Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat”**.

Sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan.

Keberhasilan program/kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Ngampilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran renstra tercermin dari tingkat perkembangan pembangunan yang semakin baik. Berikut tabel terkait tujuan dan sasaran Kecamatan Ngampilan :

Tabel II.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Ngampilan	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Ngampilan	<p>a. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban</p> <p>b. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat</p> <p>c. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat</p> <p>d. Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat</p>

B. PERJANJIAN KINERJA

a. Indikator Kinerja Utama

Pada tahun 2018 merujuk pada RPJMD Kota Yogyakarta maka Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk kecamatan mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dalam renstra tahun 2011 – 2016 IKU Kecamatan Ngampilan masih berpatokan pada Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (SKM) sebagai indikator keberhasilan kinerja dan mulai tahun 2017 IKU kecamatan adalah meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kecamatan dengan indikator nilai perkembangan pembangunan kecamatan. Pengukuran SKM tetap dilakukan untuk mengukur kinerja pelayanan setiap periode, namun tidak menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja organisasi secara keseluruhan karena tugas pelayanan hanya bagian kecil dari tugas Kecamatan sebagai institusi pelayanan publik.

Pelayanan publik harus selalu di tingkatkan kualitasnya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. Kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan diukur dari seberapa tinggi Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap semua pelayanan Kecamatan Ngampilan, baik pelayanan langsung, seperti pelayanan KTP,

HO, Kependudukan dll, maupun pelayanan pemerintahan lainnya seperti kegiatan-kegiatan baik fisik maupun non fisik yang semuanya adalah untuk melayani masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran .

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan target yang akan dicapai pada akhir pelaksanaan program/kegiatan. Ukuran keberhasilan kinerja utama perangkat daerah sesuai dengan tugas fungsi (*core business*) yang di emban oleh masing-masing perangkat daerah. Untuk Kecamatan Ngampilan mempunyai IKU yang berfungsi untuk mengukur berhasil tidaknya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Ngampilan. Tolok ukur keberhasilan dalam menjalankan program dan kegiatan adalah tercapainya target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tabel II.3

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngampilan Tahun 2018

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2018
1	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Nilai Evaluasi Perkembangan Kecamatan Ngampilan dibagi jumlah kelurahan	388,5

Penilaian perkembangan pembangunan kecamatan dilakukan dengan melakukan evaluasi kelurahan yang dilaksanakan setiap tahun, hasil penilaian di masing-masing kelurahan menjadi penentu nilai perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan, apakah mengalami kemajuan atau justru menurun tingkat perkembangannya. Instrumen penilaian telah ditetapkan dengan Permendagri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, evaluasi dilakukan secara bertahap melalui beberapa jenjang yang meliputi tahap evaluasi diri dan tahap verifikasi administrasi dan kunjungan lapangan. Parameter penilaian ini sangat banyak dan dilakukan dengan menggunakan format penilaian Evaluasi Kelurahan yang dapat mencerminkan kondisi riil masyarakat baik dari segi fisik maupun non fisik

Langkah untuk mendukung keberhasilan agar perangkat daerah dapat mewujudkan target yang telah ditetapkan maka Perjanjian Kinerja dibuat sebagai kontrak kerja antara Kecamatan Ngampilan dan Pemerintah

Kota Yogyakarta. Perjanjian Kinerja disusun dengan menetapkan target yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Kecamatan Ngampilan telah menetapkan Perkin tahun 2018 dan selalu dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaannya sehingga pada proses perubahan anggaran melakukan rasionalisasi dan penyesuaian terhadap aturan dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan program/kegiatan. Hasil dari proses evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun 2018 tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel II.4
Perubahan Perjanjian Kinerja
Kecamatan Ngampilan Tahun 2018

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Ngampilan dibagi jumlah kelurahan	388,5	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	1.267.018.765,-

Perjanjian kinerja ini kemudian di *breakdown* kepada seluruh pejabat struktural sesuai dengan tupoksinya. Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngampilan menjadi dasar bagi pejabat struktural yang ada di Kecamatan Ngampilan untuk membuat perjanjian kinerja dengan atasan langsungnya. Hal ini penting untuk mengukur capaian kinerja masing-masing pejabat struktural dalam mengampu tugas dan tanggungjawabnya dan mengacu pada tupoksi dan target yang ditetapkan dalam tahun berjalan. Capaian Kinerja ini akan menjadi dasar dalam memberikan reward kepada pegawai yang besarnya sangat tergantung pada capaian kinerja yang dilakukan, apabila realisasi sesuai dengan target kerjanya maka rewardnya juga besar demikian sebaliknya apabila target tidak tercapai maka rewardnya berkurang.

2. Rencana Aksi

Rencana Aksi adalah serangkaian tindakan dan langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai tujuan dengan menentukan detail kegiatan dan tahap-tahap capaian yang menjadi target. Rencana aksi merupakan langkah operasional yang dilakukan oleh masing-masing pelaksana kegiatan (PPTK) dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Penyusunan rencana aksi bergantung pada analisis pelaksanaan kegiatan dengan menetapkan tata kala dan target yang akan diacapai per triwulan, hal ini untuk mengukur seberapa jauh capaian kinerja

yang dilakukan. Evaluasi terhadap capaian kegiatan selalu dilakukan dan hasil dari proses evaluasi digunakan untuk memperbaharui rencana aksi yang dilakukan pada bulan berikutnya.

Tabel II.5
Rencana Aksi Kecamatan Ngampilan Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Program/ Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	TW I	TW II	TW III	TW IV
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tingkat perkembanagn pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan	388,5	388,5	388,5	388,5	Program Peningkatan Pelayanan & Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang di laksanakan dengan baik	100%	1.267.018.765,00	274.655.310,00	306.779.875,00	530.665.885,00	154.917.695,00
							Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan		100%	166.763.640,00	114.928.000,00	22.935.640,00	14.440.000,00	14.460.000,00
							Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kec. Ngampilan		100%	42.762.395,00	3.573.490,00	13.299.435,00	16.094.235,00	9.795.235,00
							Pembinaan Sosial & Budaya Masyarakat Kec.Ngampilan		100%	194.005.400,00	25.477.600,00	47.630.800,00	89.633.000,00	31.264.000,00
							Pembinaan Ekonomi,Sosial& Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan		100%	288.024.380,00	39.546.820,00	127.577.000,00	61.703.500,00	59.197.060,00
							Pembinaan Ekonomi,Sosial& Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan		100%	187.184.000,00	50.015.000,00	64.027.000,00	56.308.000,00	16.834.000,00
							Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan		100%	388.278.950,00	41.114.400,00	31.310.000,00	292.487.150,00	23.367.400,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2018

Penyelenggaraan Pemerintahan menuju Good Governance dalam rangka reformasi birokrasi yang berbasis kinerja berorientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran digunakan untuk mencapai rumusan perubahan pada level keluaran, hasil maupun dampak. Akuntabilitas menunjukkan sejauh mana perangkat daerah telah memenuhi tugas dan fungsinya dalam mencapai target kerjanya. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah kepada publik. Sebagai bagian dari komitmen Kecamatan Ngampilan untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, adalah dengan mendorong pengendalian serta evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan perencanaan dan arah kebijakan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Seluruh Program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2018 dibiayai dengan APBD Kota Yogyakarta, oleh karena itu dalam pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngampilan mengacu pada program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana tertuang pada DPA / DPPA Kecamatan Ngampilan Tahun 2018. Berikut adalah capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2018:

Tabel III.1
Capaian Program Kegiatan Tahun 2018

NO	PROGRAM	KEGIATAN				CAPAIAN (%)
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	603.684.239,00	594.801.543,76	98,52

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kelancaran Administrasi	Peningkatan Kelancaran Administrasi	251.772.224,00	247.122.662,00	98,15
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD	Meningkatnya Kinerja dan kelancaran Administrasi	Peningkatan Kinerja dan kelancaran Administrasi	11.180.900,00	11.079.280,00	99,09
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	Terlaksananya Pelimpahan Kewenangan di Kecamatan Ngampilan	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan Dengan Baik	1.267.018.765,00	1.248.592.159,00	98,54
			Jumlah	2.133.656.128,00	2.101.595.644,76	98,49

Dari hasil pelaksanaan program diatas dapat dikatakan bahwa capaian Kinerja Anggaran di kategorikan Sangat Berhasil dengan capaian 97,16 %.

Tabel III.2
Capaian Indikator Program Kegiatan

No.	Program	Target (output)	Capaian Indikator
		kegiatan	Fisik (%)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3	100
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	100
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan SKPD	1	100
4.	Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan pemberdayaan Masyarakat Berbasis kewilayahan	6	100
	Predikat Kinerja dari seluruh program		Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian output yang dilaksanakan Kecamatan Ngampilan Tahun 2018 diperoleh nilai dengan predikat sangat berhasil karena semua perencanaan program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, meskipun capaian keuangannya tidak terserap secara keseluruhan.

Sedangkan pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pencapaian IKU secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel III.2
Pencapaian IKU Kecamatan Ngampilan Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2018	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Ngampilan	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Ngampilan	388,5	388,5	100 %

Dari tabel diatas pencapaian IKU Kecamatan Ngampilan Tahun 2018 mencapai 100% dalam kategori Sangat Berhasil, nilai tersebut merupakan hasil dari evaluasi diri yang dilakukan oleh kelurahan-kelurahan. Evaluasi Kelurahan merupakan salah satu parameter penilaian kelurahan yang meliputi beberapa bidang yaitu :

1. Pemerintahan Umum
2. Kemasyarakatan
3. Kewilayahan

Variabel penilaian dari ketiga bidang tersebut telah mampu

merepresentasikan kondisi kelurahan secara makro sehingga dari hasil penilaian di tingkat kelurahan tersebut akan dapat menentukan tingkat kemajuan perkembangan kelurahan dan kecamatan secara umum.

Kecamatan Ngampilan sebagai salah satu perangkat daerah yang *core bussines*-nya pelayanan juga mengukur kinerja pelayanan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Adapun hasil pengolahan SKM semester I dan II tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel III.3

Hasil Perolehan SKM Kecamatan Ngampilan Tahun 2018

URAIAN	Semester I	Semester II
IKM Unit Pelayanan	81,07	81,12
Mutu Pelayanan	B	B
Kinerja Unit Pelayanan	BAIK	BAIK

Dari data tersebut kinerja pelayanan Kecamatan Ngampilan memiliki kinerja yang baik, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Ngampilan cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2018. Meskipun saat ini SKM bukan menjadi indikator utama kinerja kecamatan namun mutu pelayanan harus terus ditingkatkan sebagai salah satu bagian dari upaya Reformasi Birokrasi yang mengedepankan kepentingan masyarakat dan merubah *mindset* negatif dari masyarakat tentang pelayanan birokrasi pemerintahan.

Disamping dengan pengolahan Survey Kepuasan Masyarakat masih

digunakan penyebaran kuesioner versi lain untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Ngampilan benar-benar tepat. Survey dilakukan untuk meneliti dan menilai kinerja Kecamatan Ngampilan secara konkret dengan beberapa parameter penilaian dan menggunakan skala linkert. Berikut beberapa variabel penilaian yang dilakukan yaitu :

No	Variabel Penilaian	Jumlah Pertanyaan	Variabel Penilaian
1.	Kepemimpinan	8	STS : Sangat Tidak Setuju TS : Tidak Setuju R : Ragu-ragu S : Setuju SS : Sangat Setuju
2.	Perencanaan	3	
3.	Kepuasan Masyarakat	7	
4.	Sumber Daya Manusia	5	
5.	Proses Internal	4	
6.	Sistem Informasi Manajemen	5	
7.	Kinerja Organisasi/Perangkat Daerah	7	

Survey ini hampir sama dengan Evaluasi Perkembangan Kelurahan, dimana pegawai melakukan penilaian terhadap kinerja Kecamatan Ngampilan dengan 7 parameter tersebut, dalam survey ini melibatkan 30 orang pegawai di Kecamatan Ngampilan. Hasil survey setelah diolah dengan menggunakan skala linkert, hasilnya sebagai berikut :

Tabel III.4
Analisa Kinerja Kecamatan Ngampilan

No	Variabel	JAWABAN					Nilai	%
		STS	TS	R	S	SS		
1.	Kepemimpinan	0	0	1	122	118	1.076	89,67
2.	Perencanaan	0	0	0	68	22	382	84,89
3.	Kepuasan Masyarakat/Eksternal	0	0	2	154	54	892	84,95
4.	Sumber Daya Manusia	0	0	1	79	70	669	89,20
5.	Proses Internal	0	0	0	67	53	533	88,83

6.	Sistem Informasi Manajemen	0	0	1	94	55	654	87,20
7.	Kinerja Perangkat Daerah	0	0	1	128	81	920	87,62
	Jumlah	0	0	6	712	453	5.126	87,60

Skala Linkert :

Skor maksimal : Jml responden x Jml pertanyaan x 5

$$30 \times 39 \times 5 = 5.850$$

Skor minimal : jml responden x jml pertanyaan x 1

$$30 \times 39 \times 1 = 1.170$$

Interval : $(5.850 - 1.170) : 5 = 936$

Interval	Kategori
1170 - 2106	Sangat Rendah
2007 - 3043	Rendah
3044 - 3980	Sedang
3981 - 4917	Tinggi
4918 - 5850	Sangat Tinggi

Dari hasil akumulasi penilaian keseluruhan tabel di atas, jumlah penilaian untuk seluruh variabel adalah 5.126 atau 87,60% dari nilai maksimal, dalam kategori sangat tinggi. Hasil survey kinerja ini selaras dengan hasil SKM yang mencerminkan bagaimana Kecamatan Ngampilan menjalankan tupoksinya sebagai garda depan pelayanan, peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.

Dari hasil analisa survey kinerja Kecamatan Ngampilan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepemimpinan

Hasil penilaian dari variabel Kepemimpinan dapat disimpulkan bahwa kinerja pimpinan pada Kecamatan Ngampilan mendapatkan nilai 1.076 dengan prosentase 89,67% sehingga dalam skala linkert variabel kepemimpinan

masuk pada kategori sangat tinggi. Hal ini berarti bahwa Camat mampu mengarahkan bawahannya untuk memahami tugas pokoknya dan mampu menggerakkan kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Ngampilan dalam mendukung perwujudan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Camat juga mampu menciptakan suasana kondusif dalam lingkungan kerja dengan mendorong pegawai untuk terus meningkatkan kapabilitas dalam bekerja dan menciptakan persaingan yang sehat dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.

2. Perencanaan

Dari variable Perencanaan mendapatkan nilai 382 dengan prosentase 84,89 %, dalam skala linkert perencanaan dikategorikan sangat tinggi. Hal ini berarti bahwa proses perencanaan program dan kegiatan di Kecamatan Ngampilan telah melibatkan pegawai untuk memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya. Pegawai juga mengetahui dan merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan tata kala yang telah direncanakan, hal ini penting agar semua pegawai memiliki peran dalam proses perencanaan dan selalu mengikuti tahapan-tahapan dalam proses perencanaan program dan kegiatan di Kecamatan Ngampilan.

3. Kepuasan Masyarakat/ Faktor Eksternal

Dari variabel Pihak/faktor eksternal (Kepuasan Masyarakat) mendapatkan nilai 892 dengan prosentase 84,95%, dalam skala linkert faktor eksternal dapat dikategorikan sangat tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para pegawai Kecamatan Ngampilan memahami bagaimana memberikan pelayanan yang *excellent*, menjaga hubungan baik dengan customer dan bersedia menerima kritik/saran untuk kemajuan kinerja Kecamatan Ngampilan.

4. Sumber Daya Manusia

Dari variabel Sumber Daya Manusia ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai dapat dinilai sangat tinggi hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai 669 dengan dan prosentase 89,20%. Nilai ini berkaitan dengan kemampuan pegawai Kecamatan Ngampilan mengembangkan kerjasama dalam teamwork yang solid sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta memungkinkan pegawai mengembangkan inovasi dalam meningkatkan hasil pekerjaan. Kecamatan Ngampilan juga berupaya memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan pegawai melalui diklat/pelatihan serta memberikan usulan promosi jabatan bagi yang memiliki kinerja tinggi.

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi alasan klasik dalam setiap hambatan yang muncul dalam optimalisasi kinerja, namun Kecamatan Ngampilan mampu mengoptimalkan peran masing-masing pegawai sehingga semua ketugasan dapat terlaksana dengan baik.

5. Proses Internal

Dari variabel Proses internal ini mendapat perolehan nilai yang mencapai 533 dan prosentase 88,83%, dengan kategori sangat tinggi dalam skala likert untuk proses internal. Hal ini berarti bahwa dalam proses pelaksanaan tugas di Kecamatan Ngampilan, masing-masing pegawai telah memiliki uraian tugas dan memiliki prosedur kerja yang jelas dalam melaksanakan pekerjaan tim. Sehingga tidak ada *overlapping* dalam pelaksanaan tugas karena sudah ada job discription yang jelas.

6. Sistem Informasi Manajemen

Dari variabel Sistem Manajemen Informasi mendapatkan nilai 654 atau 87,20% dengan kategori sangat tinggi, hal ini berarti bahwa di Kecamatan Ngampilan telah memiliki prosedur dan tata kerja terkait pelaporan hasil kerja. Pegawai mendapatkan semua informasi mengenai kebijakan-kebijakan Kecamatan Ngampilan dan mendapat informasi yang dibutuhkan untuk

melaksanakan pekerjaan. Dalam hal pelaksanaan tugas, Kecamatan Ngampilan telah menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas agar lebih efektif dan efisien.

7. Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Ngampilan)

Dari variabel hasil organisasi mendapat kategori sangat tinggi dengan perolehan nilai yang mencapai 920 dengan prosentase 87,62%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pekerjaan pegawai telah memenuhi seluruh persyaratan yang ada dan memuaskan pegawai serta masyarakat. Kecamatan Ngampilan memiliki standar kerja dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan memberikan kebijakan yang dapat menjadi solusi dalam setiap hambatan / permasalahan yang muncul.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tingkat kinerja Instansi memang sangat tinggi sehingga dari hasil survey kepada masyarakat dan pegawai tersebut Kecamatan Ngampilan telah berupaya untuk mencapai sasaran agar tingkat perkembangan pembangunan di Kecamatan Ngampilan semakin meningkat dengan perbaikan perencanaan, kepemimpinan, sistem dan variabel lainnya.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Analisis akuntabilitas kinerja juga memuat keterkaitan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan ini untuk mengevaluasi tingkat perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Tahun 2016 merupakan akhir periode perencanaan renstra 2011-2016, sehingga menjadi patokan dalam penentuan start awal perencanaan renstra periode 2017-2022. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan tahun ini terlihat dalam tabel berikut :

Tabel III.5

Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2017 dan 2018

No.	Program	2017 (%)	2018 (%)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	94,07	98,52
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	96,00	98,15
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	95,54	99,09,
4	Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	95,40	98,54

Dari data tersebut terlihat bahwa capaian kinerja keuangan mengalami penurunan prosentase dalam capaian kinerja keuangan namun target fisik capaian tetap 100%. Kendala terkait sistem pembayaran non tunai dan kemampuan PPTK dalam menyesuaikan dengan sistem yang baru sangat berpengaruh terhadap capaian realisasi keuangan. Transaksi non tunai yang dilakukan memang masih memiliki banyak kelemahan yang menghambat kelancaran administrasi dan transaksi keuangan, sehingga perlu adanya penyempurnaan sistem yang lebih baik lagi agar pelaksanaan non tunai bisa lebih efisien.

Indikator kinerja utama Kecamatan Ngampilan saat ini adalah nilai evaluasi perkembangan kelurahan, berikut adalah hasil nilai Evaluasi Kelurahan dalam 2 (dua) tahun terakhir :

Tabel III.6

Nilai Evaluasi Kelurahan

No.	Uraian	2017	2018	Naik/Turun
1.	Nilai Evaluasi Kelurahan Ngampilan	389	388,5	Turun
2	Nilai Evaluasi Kelurahan Notoprajan	388	388,5	Naik
3	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Ngampilan	388,5	388,5	Naik

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat perbandingan Capaian kinerja sudah berada di posisi angka yang tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya hal ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan Kecamatan Ngampilan sudah baik

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun ini dengan target jangka menengah sesuai dengan Renstra Kecamatan Ngampilan tahun 2017 - 2022

Tahun 2018 merupakan tahun kedua pelaksanaan renstra sehingga masih banyak penyesuaian terhadap program dan kegiatan dari renstra sebelumnya. Berikut adalah data terkait prosentase kinerja tahun 2018 dengan target capaiannya sebagai berikut :

Tabel III.7
Realisasi Tahun 2018 dibandingkan Target capaian Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Target RENSTRA Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Kinerja Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	603.684.239,00	594.801.543,76	98,52
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Peningkatan Kelancaran Administrasi	251.772.224,00	247.122.662,00	98,15
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Peningkatan Kinerja dan kelancaran Administrasi	11.180.900,00	11.079.280,00	99,09

	Capaian Kinerja & Keuangan SKPD				
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan Dengan Baik	1.267.018.765,00	1.248.592.159,00	98,54

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa Realisasi Kinerja dibandingkan dengan target Jangka menengah sesuai Renstra dikategorikan tinggi. Walaupun masih ada program kegiatan yang masih perlu perbaikan dengan kata lain bisa lebih tinggi apabila sampai pada akhir periode Tahun 2018 semua berjalan lancar.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja

Kinerja Kecamatan Ngampilan tahun 2018 sangat menggembirakan karena dari tahun ke tahun kinerja Kecamatan Ngampilan terus mengalami peningkatan. Hambatan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 tentunya ada namun hal tersebut tidak menjadi faktor terjadinya kegagalan.

Keberhasilan Kecamatan Ngampilan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan tahun 2018, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat karena beberapa aspek :

a. Proses Perencanaan yang baik

Proses perencanaan memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Ngampilan, karena perencanaan tersebut memuat analisa program dan kegiatan yang dapat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngampilan. Dan

perencanaan tersebut dapat memberikan arah untuk mewujudkan pembangunan dan kegiatan berkelanjutan yang sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Ngampilan tahun 2017-2022.

- b. Sistem Informasi Manajemen yang diterapkan dengan berbasis teknologi Sistem IT sangat diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas agar penggunaan waktu dan SDM bisa digunakan secara efektif dan efisien. Keuntungan lain bahwa transparansi dan keterbukaan informasi dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan arah upaya perbaikan reformasi birokrasi pemerintahan.

- c. Tim kerja yang solid

Keberhasilan Kecamatan Ngampilan dalam meningkatkan kinerja secara individu dan organisasi merupakan hasil dari kerja keras seluruh komponen yang ada di Kecamatan Ngampilan baik internal maupun eksternal. Tim kerja yang solid antar sesama pegawai, masyarakat dan pihak eksternal merupakan modal yang sangat penting untuk mewujudkan Kinerja Kecamatan Ngampilan yang semakin baik.

- d. Komitmen pimpinan (Camat) dalam mengembangkan tematik pembangunan wilayah dan dalam pembinaan pegawai.

Komitmen pimpinan memiliki pengaruh besar terhadap kinerja pegawai dan dalam menumbuhkan antusiasme masyarakat dalam mendukung setiap dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ngampilan.

- e. Sarana Prasarana kerja yang mendukung

Sarana dan prasarana kerja merupakan modal kerja yang harus tersedia secara cukup agar masing-masing pegawai dapat menjalankan tupoksinya secara maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut Kecamatan memiliki kewenangan untuk melakukan pembelian sarana prasarana kantor sendiri, karena sebelumnya semua pembelian barang belanja modal masih tersentral di bidang aset (BPKAD).

f. Kerjasama lintas sektor yang saling mendukung

Kecamatan Ngampilan memiliki kepentingan untuk terus menjalin kerjasama lintas sektor karena Kecamatan Ngampilan tidak akan dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tanpa kerjasama dari semua komponen baik instansi vertikal, organisasi masyarakat/ lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat.

g. Potensi Sumber Daya Sosial dan Ekonomi di Wilayah Kecamatan Ngampilan

Kecamatan Ngampilan memiliki potensi yang sangat banyak dan perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan keberdayaan masyarakat dalam hal ekonomi, sosial dan budaya.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas penggunaan sarana prasarana, anggaran serta Sumberdaya bisa digunakan secara efisien terutama untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penerapan sistem berbasis teknologi informasi (IT)

Reformasi Birokrasi yang dilakukan untuk menjamin tata kelola yang baik mensyaratkan adanya transparansi dan keterbukaan informasi terkait dengan pelaksanaan pemerintahan maupun dalam pelayanan publik. Penerapan sistem berbasis IT menjadi solusi agar kinerja menjadi lebih efisien, hal ini terkait dengan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) karena personil yang terbatas sementara tugas dan tanggungjawab di Kecamatan Ngampilan sangat banyak. Dengan sistem berbasis IT akan memperlancar

pelaksanaan tugas dan kinerja individu menjadi lebih efisien. Beberapa sistem yang telah digunakan di Kecamatan Ngampilan adalah :

1. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Sistem ini merupakan sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memudahkan dalam penatausahaan keuangan sehingga setiap transaksi keuangan dapat terekam dalam setiap pencatatan belanja. Sistem ini sangat efisien karena kode rekening, anggaran dan plotting kegiatan bisa diakomodir dalam SIPKD sehingga lebih mudah dan lebih efisien waktu.

Sistem ini juga bisa digunakan untuk menyusun laporan akuntansi secara otomatis sehingga keterbatasan SDM bisa diatasi dengan sistem ini.

2. Sistem Pengendalian Pembangunan (SIM Dalbang)

Dalam sistem ini ada 3 (tiga) menu yaitu SIM Pengendalian Pembangunan, SIM Evaluasi Renja dan SIM E-LKIP.

SIM Pengendalian Pembangunan berfungsi untuk memantau capaian target fisik dan keuangan di masing-masing PPTK, sedangkan SIM Evaluasi Renja berguna untuk melakukan evaluasi per triwulan dari pelaksanaan kegiatan tahun berjalan dan memantau tingkat capaian kinerja dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Ngampilan.

Sedangkan SIM E-LAKIP merupakan sistem yang digunakan untuk melihat perencanaan strategis Kecamatan Ngampilan dan menyajikan program kegiatan yang mendukung terwujudnya visi dan misi yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2017 – 2022.

3. Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)

Menyajikan data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan naban yang masih aktif bekerja di Kecamatan Ngampilan. SIM ini menyajikan data diri pegawai dan riwayat kepegawaian serta hal-hal lain yang terkait dengan data diri pegawai.

4. Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah (Simbada)

Sistem ini memudahkan dalam melakukan inventarisasi barang aset maupun barang pakai habis, sehingga penatausahaan barang menjadi lebih mudah dilakukan.

5. Sistem untuk pengaduan masyarakat (UPIK)

Sistem yang dirancang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, saran, kritik ataupun keluhan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan dan pelaksanaan program kegiatan di wilayah. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan semacamnya dengan melalui aplikasi online Website, SMS dan Hotline service yang disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sistem informasi tersebut diatas hanya sebagian kecil dari sistem yang telah digunakan oleh Kecamatan Ngampilan, karena masih banyak sistem/aplikasi lain yang digunakan untuk mendukung ketugasan sehingga waktu pengerjaan tugas lebih efisien dan juga terjadi efisiensi penggunaan SDM.

b. Penerapan Anggaran berbasis Kinerja

Ukuran keberhasilan dalam penggunaan anggaran adalah bagaimana output outcome bisa tercapai dengan anggaran seefisien mungkin. Jadi ukuran keberhasilan program dan kegiatan adalah pencapaian kemanfaatan yang maksimal dengan penggunaan anggaran yang efisien.

Berkaitan dengan hal tersebut beberapa efisiensi anggaran yang ada di Kecamatan Ngampilan adalah :

- Penggunaan belanja jasa listrik, telepon dan air yang dipergunakan secara efektif sehingga tidak timbul pemborosan sumber daya listrik, telepon dan air.
- Penggunaan Belanja alat listrik dan elektronik dengan realisasi keuangan efisien namun target outcome bahwa ketersediaan alat listrik dan elektronik selama tahun 2018 sudah terpenuhi.

- Penggunaan Belanja Makan Minum harian pegawai untuk tahun 2018 dilakukan efisiensi dengan membatasi jumlah personil yang diampu dalam belanja tersebut yaitu hanya PNS dan Naban di Kecamatan Ngampilan. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat efisiensi penggunaan anggaran Belanja Makan minum pegawai namun secara output dan outcome tetap dapat tercapai.
- Sedangkan untuk cetak foto juga diminimalkan dengan alasan bahwa pencetakan foto hanya untuk hal-hal penting saja, semntara untuk dokumentasi cukup dalam bentuk soft file tanpa harus dicetak.
- Belanja narasumber dan instruktur juga dalam penganggaran dilakukan secara selektif dengan prinsip efisiensi, meskipun SHBJ memberikan batas tertinggi untuk narasumber /instruktur Rp 600.000 per os/jpl namun dalam perencanaan kegiatan batasan tersebut tidak dimaksimalkan agar ada efisiensi dalam penganggran.
- Belanja honorarium panitia, tim dan honorarium lainnya untuk non PNS/ masyarakat telah dilakukan efisiensi dan penghematan melalui analisa kebutuhan dengan pola minimal, hal ini untuk menjamin kegiatan/program tetap berjalan lancar meskipun personil pengampu kegiatan dibatasi. Dan untuk pegawai pemerintah kota sudah tidak diberikan honorarium karena sudah diberikan TPP.

6. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

a. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai. Sehingga evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk

mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan dalam kerangka perencanaan strategis. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara berkala dalam bentuk Evaluasi Renja Kerja (Evaluasi Renja) dengan memanfaatkan Sistem Pengendalian Pembangunan. Hasil Evaluasi program dan kegiatan telah digunakan untuk perbaikan perencanaan berikutnya antara lain :

- Penggabungan kegiatan Pembinaan Perekonomian Kecamatan Ngampilan dan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian antara kegiatan dengan struktur Kecamatan Ngampilan sehingga masing-masing kegiatan memiliki pejabat penanggungjawab kegiatan yang sesuai dengan tupoksi jabatan. Hasil Evaluasi ini kemudian digunakan untuk penyempurnaan perencanaan untuk tahun 2018.
- Penyederhanaan Nomenklatur kegiatan menjadi analisis pemikiran terutama untuk lebih memudahkan dalam pengukuran kinerja dan menyederhanakan proses perencanaan berkaitan dengan hal ini untuk tahun 2018 telah dilakukan penyederhanaan di level program dan kegiatan baik pada program internal maupun program eksternal.
- Evaluasi juga dilakukan terhadap perencanaan sub kegiatan yang tidak sesuai dengan SHBJ dan standar Belanja serta kesalahan dalam pencantuman kode rekening maka untuk mengatasi hal tersebut dilakukan proses perencanaan ulang yang dilakukan pada proses perubahan anggaran tahun 2018.

Perencanaan yang kurang bagus di level PPTK mengakibatkan kesalahan plotting anggaran sehingga ketika kegiatan tersebut dilaksanakan, penyediaan dana per triwulan tidak mencukupi. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian pertanggungjawaban karena harus menunggu penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) triwulan berikutnya. Berkaitan dengan hal ini maka untuk tahun 2018 dilakukan pencermatan dalam melakukan plotting anggaran.

1. Evaluasi Kinerja Sasaran

Capaian kinerja sasaran diperoleh dari nilai hasil Evaluasi kelurahan dari Kelurahan Notoprajan dan Kelurahan Ngampilan. Hasil evaluasi menjadi nilai tingkat perkembangan pembangunan kecamatan yang merupakan indikator sasaran Kecamatan Ngampilan. Nilai yang dicapai tahun ini sebesar 388,5 telah melebihi target yang ditetapkan, hal ini sangat penting untuk terus meningkatkan kinerja meskipun target sasaran tahun ini telah terlampaui.

Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan dalam pencapaian IKU melalui evaluasi kelurahan mencakup beberapa variabel internal Kecamatan Ngampilan dan faktor eksternal.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur merupakan hal yang urgent karena dengan adanya program ini maka semua kebutuhan sarana dan prasarana kerja untuk pelaksanaan tugas terpenuhi sehingga tidak mengalami gangguan dalam pelaksanaan kegiatan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan juga sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan. Dan dengan program ini juga berpengaruh untuk melakukan proses evaluasi terhadap program dan kegiatan agar

perencanaan dan pelaksanaan menjadi lebih baik sehingga pencapaian kinerja bisa berhasil dengan baik.

Sedangkan program pokok yang berkaitan langsung dengan pencapaian IKU adalah Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan, karena kegiatan yang ada di dalamnya merupakan kegiatan eksternal yang melibatkan masyarakat sebagai sasaran kegiatan. Secara umum program ini dapat dilaksanakan dengan baik karena semua PPTK memiliki kemampuan manajerial yang baik sehingga petugas urusan dan petugas keuangan di masing-masing PPTK bisa dimaksimalkan potensinya dan kendala yang paling besar adalah terkait dana administrasi untuk kelompok PKK Rt dan RW yang menyulitkan kelurahan dalam menghimpun administrasi keuangannya. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu ada kebijakan khusus penyaluran dana bantuan administrasi PKK RT/RW agar lebih efektif dan tidak mempengaruhi capaian kinerja keuangan.

2. Seluruh program dan kegiatan berhasil dilakukan karena target fisik tercapai 100% sehingga, hanya perlu optimalisasi perencanaan kegiatan agar capaian realisasi keuangan bisa sejalan dan tercapai 100% pada tahun berikutnya.

Keterbatasan SDM yang ada perlu disiasati dengan penambahan kapasitas pegawai dengan Bimtek atau pelatihan pengembangan diri, namun Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tidak diperkenankan di level Kecamatan mulai tahun 2018, hal ini tentunya menghambat upaya untuk meningkatkan kapabilitas pegawai mengingat kuota pelatihan di BKPP Kota Yogyakarta juga sangat terbatas.

Hal ini perlu kebijakan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar program tersebut bisa dilaksanakan kembali di tingkat Kecamatan karena UU ASN juga mengamanatkan agar ASN selalu mendapatkan pelatihan / pengembangan diri secara rutin setiap tahun minimal 1 (satu) kali. Dan secara umum terkait SDM perlu untuk menjadi catatan bagi BKPP Kota Yogyakarta agar kekosongan jabatan di wilayah dianalisa secara berkala agar bisa segera

terisi karena load kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan sangat banyak dengan adanya pelimpahan kewenangan yang terus bertambah.

B. Realisasi Anggaran

Reformasi birokrasi merupakan strategi untuk menjawab menguatnya desakan publik akan perbaikan kinerja instansi pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik. Sasaran dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi. Dengan Peningkatan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel diharapkan akan dapat mewujudkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat. Secara singkat realisasi anggaran Kecamatan Ngampilan adalah sebagai berikut :

Tabel III.8
Realisasi Anggaran Kecamatan Ngampilan Tahun 2018

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)	Capaian %
		ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5 = (3-4)	6
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.405.132.787,00	1.336.822.047,00	68.310.740,00	95,13
2	BELANJA LANGSUNG	2.133.656.128,00	2.101.595.644,76	32.060.483,24	98,49
	JUMLAH	3.538.788.915,00	3.438.417.691,76	100.371.223,24	97,16

Dari tabel tersebut capaian untuk Belanja Tidak Langsung sebesar 95,13% hal ini karena untuk perencanaan Belanja Tidak Langsung masih menjadi ranah kewenangan Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Yogyakarta, sehingga Kecamatan Ngampilan tidak memiliki kewenangan untuk menganalisa perencanaan anggaran Belanja Tidak Langsung. Dari capaian relaisaswi anggaran Belanja tidak langsung tersebut memang untuk tahun berikutnya perlu

pencermatan lagi oleh BPKAD agar realisasi anggaran tidak jauh dari target perencanaan.

Sedangkan untuk Belanja Langsung capaian realisasi keuangan mencapai 98,49%, hal ini bisa dikategorikan sangat bagus karena hanya ada interval 5% dari target seluruh anggaran. Berikut data realisasi anggaran per program dan penjelasannya:

Tabel III.9
Realisasi Pelaksanaan Program Tahun 2018

No	Program	Anggaran Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	603.684.239,00	594.801.543,76	98,52	d. Kebijakan untuk Belanja Makan Minum pegawai dirasionalisasi hanya untuk ASN dan Naban sehingga anggaran tidak terealisasi semua. e. Belanja Alat listrik dan elektronik disesuaikan dengan kebutuhan sehingga realisasi hanya 93,96% f. Belanja jasa listrik, telepon, air dan surat kabar menyesuaikan dengan tagihan per bulan. g. Belanja STNK terutama untuk penggantian plat dan STNK biaya tidak sebesar yang direncanakan sehingga realisasi anggaran hanya 63,21%.
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	251.772.224,00	247.122.662,00	98,15	Kegiatan belanja Service tidak terserap penuh karena kondisi kendaraan masih baru, sedangkan untuk Belanja BBM dan Pelumas ada efisiensi sehingga sesuai dengan penggunaan riil.
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	11.180.900,00	11.079.280,00	99,09	Penyerapan anggaran untuk kegiatan cukup lancar
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.267.018.765,00	1.248.592.159,00	98,54	Secara umum program eksternal yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat berjalan sesuai dengan

	Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan				perencanaan. Adanya gap antara perencanaan dan realisasi yang tidak lebih dari 5% masih dalam taraf wajar.
--	---	--	--	--	--

BAB IV PENUTUP

LKIP Kecamatan Ngampilan ini menggambarkan kinerja Kecamatan Ngampilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian target Kecamatan Ngampilan tahun 2018 dan mendukung capaian RPJMD Kota Yogyakarta serta target nasional. Kecamatan Ngampilan melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. LKIP menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi dengan menciptakan sistem pelaporan yang transparan, akuntabel dan terukur. Sementara bagi publik, LKIP menjadi ukuran penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja kecamatan dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

LKIP bagi merupakan bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Kecamatan, pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dengan data pendukung yang mengurai pencapaian tahun pelaporan (2018) dan membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Kecamatan Ngampilan. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan (Renja). Secara umum kinerja Kecamatan Ngampilan sangat bagus, hasil monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan perencanaan yang lebih baik.

Dalam pelaksanaannya telah mencapai keberhasilan namun juga ditemui adanya ketidakberhasilan karena beberapa hambatan yang dihadapi. Adapun keberhasilan yang telah dicapai antara lain disebabkan oleh :

1. Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas
2. Adanya SDM yang handal
3. Adanya semangat kerja yang baik

4. Lingkungan kerja yang kondusif
5. Adanya kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan stakeholder
6. Adanya potensi dan Sumber Daya Sosial dan Ekonomi di Wilayah
7. Adanya komitmen Camat untuk mengembangkan Kecamatan

Sedangkan hambatan dan kendala yang ada, dikarenakan :

1. Kuantitas Sumber Daya pegawai yang belum sesuai dengan beban tugas
2. Program dan kegiatan yang belum memberikan kemanfaatan yang signifikan bagi kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelatihan/bimtek ketrampilan
4. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi sebagai sarana penyebarluasan informasi.
5. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang parsial sehingga upaya peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat kurang optimal.

Beberapa strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada, antara lain :

1. Peningkatan kapabilitas aparatur sipil negara melalui kegiatan pembinaan pegawai yang dilaksanakan secara rutin untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja, baik dalam forum formal maupun non formal.
2. Mengoptimalkan Dukungan Sumber daya pegawai yang ada dan memberikan kesempatan kepada pegawai yang masih potensial untuk dikembangkan dengan metode rangkap ketugasan.
3. Mengintensifkan komunikasi lintas sektor dalam menjalankan tugas.
4. Mengusulkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membuat kebijakan yang implementatif agar menyederhanakan proses administrasi kegiatan maupun keuangan.
5. Mengembangkan teknoligi informasi sebagai basis data.
6. Berupaya untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam mendukung ketugasan.

7. Selalu bekerjasama dan bermitra dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada, seperti forum BKM, Forum LPMK, Forum FKPSM, PKK dan lain-lain.

Dengan kerjasama, koordinasi dan sinergitas antar perangkat daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan maka beberapa hambatan yang muncul dapat teratasi sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target kinerja. Kinerja Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta dilihat dari nilai capaian indikator kinerja 97,16% sehingga termasuk dalam kategori berhasil

Akhir kata Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi yang diemban berdasarkan atas rencana strategis instansi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Ngampilan Tahun 2018, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Kecamatan Ngampilan di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 28 Januari 2019

Camat

Drs. ANANTO WIBOWO
NIP. 197305241992031003